

PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN *TEBU RAKYAT* (Studi pada Wilayah Kerja Pabrik Gula Redjosarie Kabupaten Magetan)

Tutik, Irwan Noor, Ainul Hayat

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: tutikdama@gmail.com

Abstract: *The Role of Stakeholder in The Development of Sugarcane (Studies on the Working Area of Redjosarie Sugar Factory in Kabupaten Magetan). Achievement of national self-sufficiency in 2014 by governance supported by Pedoman Teknis Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim who are composed by Ministry of Agriculture, which then translated back into the Implementation Guidelines and the Technical Guidelines through the Development of Sugarcane at the district/city level. Development of Sugarcane activities at the Kabupaten Magetan involving relevant stakeholders. The stakeholders have roles in the lending capital for sugar cane farmers, extension activities, Forum Temu Kemitraan (FTK) activities, dan Kebun Peraga activities. The results showed that the stakeholders have performed its role well. The roles cause coordination and control between technical team from Estate Official of Kabupaten Magetan and Redjosarie sugar factory, KPTR Sari Madu, and sugarcane farmers/farmer group. The method used is descriptive research with qualitative approach.*

Keywords: *development of sugarcane, role, stakeholder and governance*

Abstrak: *Peran Stakeholder dalam Pengembangan Tebu Rakyat (Studi pada Wilayah Kerja Pabrik Gula Redjosarie Kabupaten Magetan). Pencapaian target swasembada gula nasional pada tahun 2014 oleh pemerintah didukung oleh Pedoman Teknis Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim yang disusun Kementerian Pertanian, yang selanjutnya dijabarkan kembali menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) melalui Pengembangan Tebu Rakyat pada tingkat kabupaten/kota. Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat di Kabupaten Magetan melibatkan stakeholder terkait. Masing-masing stakeholder memiliki peran dalam kegiatan pemberian kredit modal kepada petani tebu, kegiatan penyuluhan, kegiatan Forum Temu Kemitraan, dan kegiatan kebun peraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder telah menjalankan perannya dengan baik. Peran tersebut menimbulkan adanya koordinasi dan pengawasan antara Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Magetan dan Pabrik Gula Redjosarie, Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sari Madu, dan petani tebu/keompok tani. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.*

Kata kunci: *Pengembangan tebu rakyat, peran, stakeholder, dan governance*

Pendahuluan

Perkebunan tebu rakyat mendominasi luas areal perkebunan tebu di Indonesia. Pada tahun 2009 dari total areal perkebunan tebu nasional seluas 443.832 ha, sekitar 255.513 ha (57,6%) diusahakan oleh perkebunan rakyat (PR), sedangkan 108.450 ha (24,4%) diusahakan oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan sisanya 80.069 ha (18,0%) adalah milik Perkebunan Besar Negara (Datacon, 2010). Pada tahun 2011 luas areal perkebunan tebu di Indonesia seluas 434,96 ribu hektar, sekitar 243,80 ribu hektar (56,05%) diantaranya diusahakan oleh perkebunan rakyat, sedangkan yang diusahakan oleh perkebunan besar negara seluas 76,76 ribu hektar (17,65%) dan perkebunan besar swasta seluas 114,41 ribu hektar (26,30%) (Badan Pusat

Statistik, 2011). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pasokan tebu didominasi oleh petani tebu rakyat. Oleh karena itu, pengembangan tebu rakyat harus dioptimal-kan untuk meningkatkan produksi tebu dan memenuhi pasokan bahan baku gula bagi industri gula.

Pemerintah pusat telah mengimplementasikan program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim. Pedoman dalam program ini masih bersifat umum sehingga diperlukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pada tingkat kabupaten/kota. Pengembangan Tebu Rakyat pada tingkat kabupaten/kota yaitu Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon. Pada tingkat wilayah kerja pabrik gula terdapat kegiatan-

kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat, yaitu:

1. Kredit Modal untuk Petani Tebu;
2. Kegiatan Penyuluhan;
3. Kegiatan Forum Temu Kemitraan (FTK); dan
4. Kegiatan Kebun Peraga.

Stakeholder dalam pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat pada tingkat kabupaten/kota yaitu “Tim Teknis Kabupaten/ Kota dengan keanggotaan terdiri dari Dinas yang membidangi Perkebunan, Pabrik Gula berbasis tebu dan instansi lain yang dianggap perlu; Pabrik Gula di wilayah kerjanya; Asosiasi Petani Tebu rakyat (APTR); Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR); serta Petani Tebu/ Kelompok Tani” (Direktorat Jendral Perkebunan, 2013).

Keberhasilan Pengembangan Tebu Rakyat adalah bagaimana *stakeholder* terkait yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat menjalankan peran untuk meningkatkan produktivitas tebu dan memenuhi pasokan bahan baku gula yang dibutuhkan pabrik gula. Sebagaimana menurut Taschereau dan Campos dalam Thoha (2003, h.63) *Governance* lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni: pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta.

Kabupaten Magetan memiliki beberapa potensi yang dapat diandalkan, salah satunya perkebunan tebu. Menurut Bupati Kabupaten Magetan, Bapak Sumantri, bahwa “dari sekitar 8000 hektare areal lahan tebu, di tahun 2012 Magetan berhasil memproduksi gula sebanyak 42.500 ton. Padahal, konsumsi gula masyarakat Magetan hanya sepuluh persennya. Artinya, yang 90% dikirim ke luar daerah” (megapos.co, 19 Mei 2013). Hal ini juga didukung data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2012 bahwa terjadi peningkatan tebu dari tahun ke tahun. Produksi tebu tahun 2011 sebesar 487.457,40 kwintal dan tahun 2012 sebesar 494.387,15 kwintal. Potensi tersebut menunjukkan bahwa agribisnis perkebunan tebu semakin memberikan harapan.

Terkait Pengembangan Tebu Rakyat pada wilayah kerja pabrik gula di Kabupaten Magetan, peneliti memilih studi kasus pada wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Redjosarie. Pemilihan situs penelitian ini dengan pertimbangan bahwa:

1. Cakupan wilayah PG Redjosarie mencapai 11 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan. Hal ini menunjuk-

kan bahwa pasokan tebu dari petani mencakup daerah yang luas.

2. Menurut Bapak Arie Sudarmo selaku Staf di Bagian Tanaman PG Redjosarie yang mengatakan bahwa 80% tebu berasal dari tebu rakyat dan 20% tebu merupakan hasil lahan sewa (Wawancara hari Rabu 11 Desember 2013 Pukul 13.25 WIB).

Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat tidak lepas dari bantuan kredit permodalan untuk petani. Selama ini KPTR Sari Madu, bimbingan PG Redjosarie, menjadi pihak yang memfasilitasi pembiayaan kredit modal bagi petani tebu dengan menjalin kerjasama/ *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak pemerintah daerah dan swasta. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sarimin selaku karyawan KPTR Sari Madu bahwa bantuan kredit modal untuk petani tebu meliputi:

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E);
2. Dana Bergulir dari APBN;
3. Dana Pembiayaan Bongkar Ratoon dari APBD Kabupaten Magetan; dan
4. Kredit Modal dari Koperasi Usaha Bersama (KUB) Rosan Kencana. (wawancara hari Senin 17 Februari 2014 Pukul 10.48 WIB)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis peran *stakeholder* dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat pada wilayah kerja PG Redjosarie Kabupaten Magetan serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat peran *stakeholder* dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat pada wilayah kerja PG Redjosarie Kabupaten Magetan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi pihak terkait.

Tinjauan Pustaka

A. Konsep Peran

Robbins (2001, h.227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*”. Menurut Soekanto (1990) peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

B. Administrasi Publik dan Paradigma Administrasi Publik

Menurut Dwight Waldo dalam Syafie (2006, h.25) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Menurut John M. Pfifner dalam Riyadi (2006, h.1) administrasi publik adalah suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik, pengarahan kecakapan-kecakapan, dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang.

Administrasi publik telah mengalami beberapa pergeseran paradig, yaitu:

a. Model Klasik (*Old Public Administration*)

Perspektif *old public administration* pada poinnya pada implementasi kebijakan dan penyedia layanan pada masyarakat melalui badan-badan publik. Menurut Denhardt dan Denhardt (2004, h.12) *public organizations operate most efficiently as closed system; thus citizen involvement is limited.* (Organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai sistem yang tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi). Dalam model klasik, tugas kunci dari pemerintah menurut Stoker (2004) adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik, seperti membangun dengan lebih baik sekolah, rumah, saluran pembuangan serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politisi. Administrasi publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama dan membiayainya dari hasil pemungutan pajak dan penggunaan dana-dana pemerintah lainnya.

b. *New Public Management* (NPM)

NPM mulai berkembang pada dekade 1990-an. Sasaran utama dari *New Public Management* (NPM) adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan penekanan pada efisiensi, ekonomi dan efektivitas. Teori ini dimulai dengan premis dan fakta atau setidaknya pandangan umum/ masyarakat bahwa birokrasi tradisional sudah tidak memiliki kemampuan dan semangat melayani dengan benar. Publik seringkali tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam menentukan, meencanakan, mengawasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambil.

c. *Good Governance*: Membangun Jejaring antara Pemerintah dengan Aktor Lainnya

Konsep *governance* yang memiliki fokus perhatian terhadap partisipasi, kepentingan masyarakat, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masalah-

masalah publik mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Melalui penerapan konsep *governance* diharapkan dapat mengembalikan perhatian dari administrasi publik terhadap kepentingan umum publik, khususnya dengan melibatkan partisipasi dari publik dalam proses pemenuhan kepentingan publik.

Konsep *governance* dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan selalu melibatkan negara (pemerintah), sektor privat, dan masyarakat. Ketiga aktor memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara berperan sebagai fasilitator, sektor privat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

C. Stakeholder dalam Teori Governance

1. Konsep Governance

Konsep *governance* dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government*. Dalam konsep *government*, negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik (Pratikno, 2004). Menurut Taschereau dan Campos dalam Thoha (2003, h.63) *governance* lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni: pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Utomo (2006, h.8) bahwa tuntutan perubahan dari *government* yang lebih menitikberatkan kepada "otoritas" menjadi *governance* yang menitikbertakan kepada "kompatibilitas" diantara para aktornya ialah: *State* (pemerintah); *Private* (sektor swasta); dan *Civil Society* (masyarakat madani).

Menurut Domai (2011, h.23) *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga yang mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak menjadi aktor yang paling menentukan.

2. Stakeholder dalam Governance

Hetifah (2003, h.3) mendefinisikan *stakeholder* sebagai individu, kelompok atau organisasi perempuan dan laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Selanjutnya Hetifah (2003, h.25) menyebutkan tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara

atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Menurut Hummels dalam Hadi (2011, h.103) *stakeholder are individuals and groups who have legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organization's practices, policies, and actions.*

C. Pengembangan Tebu Rakyat

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim untuk mengatur pedoman teknis pengembangan tanaman tebu, namun pedoman ini masih bersifat umum, sehingga masih perlu dijabarkan kembali menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota guna menyesuaikan dengan kondisi setempat (Direktorat Jendral Perkebunan, 2013). Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas petani tebu sebagai upaya peningkatan pendapatan petani tebu, maka perlu dilaksanakan program Pengembangan Tebu Rakyat (PTR) pada tingkat kabupaten/kota melalui Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Magetan dan situs penelitian di Pabrik Gula (PG) Redjosarie. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen/arsip dan foto. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) Peran *stakeholder* dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat di (PG) Redjosarie Kabupaten Magetan (2) Faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholder* dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat di PG Redjosarie Kabupaten Magetan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Pembahasan

1. Peran *stakeholder* dalam Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat

Stakeholder memiliki peran masing-masing dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat pada wilayah kerja PG Redjosarie Kabupaten Magetan yang meliputi:

a. Kredit modal untuk petani tebu

Terdapat empat kredit modal yang dapat dimanfaatkan oleh petani tebu pada wilayah kerja PG Redjosarie yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Dana Bergulir dari

APBN, Dana Pembiayaan Bongkar Ratoon dari APBD Kabupaten Magetan, serta Kredit dari KUB Rosan Kencana. Masing-masing pengajuan kredit hingga proses pencairan kredit kepada petani melibatkan peran semua *stakeholder*. Hal ini memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan sehingga memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* terkait.

Petani tebu mengajukan kredit modal dengan memenuhi kelengkapan persyaratan yaitu penyusunan Calon Petani Calon Lahan (CPCL), khusus untuk pengajuan KKP-E, petani harus menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), melakukan perjanjian giling tebu dengan pihak PG Redjosarie, dan menyerahkan agungan/jaminan. Selanjutnya, pihak Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Magetan dan PG Redjosarie serta pihak KPTR melakukan *check* lahan untuk melakukan validasi kesesuaian data luas lahan di CPCL dan RDKK dengan luas lahan di lapangan. Peran *stakeholder* ini menimbulkan koordinasi dan pengawasan dari masing-masing pihak.

Penyaluran kredit modal kepada petani dilakukan oleh KPTR Sari Madu dan bank BRI melalui PG Redjosarie untuk KKP-E. Penyaluran kredit ini dalam bentuk uang, khusus KKP-E penyaluran secara bertahap yaitu biaya garap, bibit, dan pupuk. Pengembalian kredit dilakukan pada waktu giling tebu. Selanjutnya, pihak KPTR Sari Madu dan PG Redjosarie akan mengembalikan pinjaman modal kepada pihak terkait yang sebelumnya telah dilakukan *Memorandum of Understanding* (MoU). Berdasarkan hal tersebut, pihak swasta yaitu KPTR Sari Madu dan pihak pemerintah yaitu PG Redjosarie telah membantu petani dalam proses pengajuan hingga pengembalian kredit modal. Selain itu, pihak pemerintah kabupaten Magetan telah menyediakan fasilitas tenaga ahli yaitu pembentukan Tim Teknis untuk membantu petani tebu di lapangan.

b. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Magetan dan PG Redjosarie, Tenaga Kontrak Pendamping (TKP), dan Pembantu Lapang Pendamping (PLP). Kegiatan penyuluhan terkait budidaya tebu meliputi:

1. Kunjungan lahan untuk verifikasi kesesuaian data luas lahan di CPCL dan RDKK dengan luas lahan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Teknis, TKP, dan PLP, maka muncul koordinasi dan pengawasan dari masing-masing pihak. Koordinasi bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap petani tebu agar

kredit modal yang akan dicairkan kepada petani tepat sasaran dan tidak terjadi manipulasi data.

2. Sosialisasi program-program pemerintah yang dilakukan pihak pemerintah maupun pihak swasta melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan setiap tahun di KPTR Sari Madu.

Selain itu, terdapat peran Pembina Tebu Rakyat (PTR) yang difasilitasi pihak PG Redjosarie. Peran PTR ini lebih menonjol karena secara langsung mendampingi kelompok tani dalam budidaya tebu. Tugas PTR tersebut adalah (1) membantu pengajuan kredit modal oleh petani tebu, (2) melakukan pengukuran lahan dengan alat GPS, serta (3) membantu petani dalam pengurusan kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit.

- c. Forum Temu Kemitraan (FTK)

Kegiatan FTK diselenggarakan 3 kali selama musim tanam dan dihadiri oleh perwakilan pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Magetan, perwakilan pihak PG Redjosarie, perwakilan KPTR Sari Madu, serta perwakilan dari petani tebu/kelompok tani. Kegiatan dalam FTK membahas permasalahan yang dihadapi petani tebu dan pabrik gula seperti:

1. Kenaikan harga BBM yang berkaitan dengan biaya terbang angkut;
2. Teknik budidaya tebu dengan teknologi baru; dan
3. Sosialisasi program pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor swasta (Pabrik Gula Redjosarie) maupun masyarakat (petani tebu) diselesaikan dengan melibatkan pihak pemerintah daerah (Dishutbun Kabupaten Magetan) sebagai pembicara. Misalnya, Dishutbun Kabupaten Magetan memberikan solusi penggunaan zat pemicu kemasakan pada tebu Bulu Lawang agar petani bisa segera panen/tebang tebu. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi keterlambatan panen dan pasokan tebu ke PG Redjosarie. Penyelesaian masalah melalui FTK ini menunjukkan sinergi antar *stakeholder* melalui musyawarah.

- d. Kegiatan Kebun Peraga

Kegiatan kebun peraga pada PG Redjosarie disebut *Single Bud Planting* (SBP). Tujuan dari SBP ini adalah pembibitan varietas tebu dalam jumlah banyak dengan lahan yang sempit. Bibit tebu melalui SBP akan dijual kepada petani tebu. Pengembangan kuantitas varietas tebu melalui SBP bertujuan peningkatan produktivitas tebu oleh petani tebu. Pengadopsian teknologi Kolumbia ini sekaligus bertujuan untuk pengembangan usaha PG Redjosarie untuk

meningkatkan pasokan bahan baku dengan penekanan biaya sewa lahan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat peran *stakeholder* dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat

- a. Faktor Pendukung

1. Dominasi peran PTR dalam kegiatan penyuluhan

Peran PTR ini terkait dalam pengukuran lahan di lapangan dengan alat GPS, membantu petani tebu dalam pelengkapan administrasi sebelum mengajukan KKP-E dan membantu petani dalam penyusunan CPCL dan RDKK. Setiap PTR membawahi 9-20 kelompok tani, hal ini akan mempermudah PTR dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pendampingan kepada petani.

2. Ketersediaan KPTR Sari Madu dan PG Redjosarie untuk tetap menjadi pihak perantara penyaluran kredit modal kepada petani tebu.

Selama ini KPTR Sari Madu dan PG Redjosarie menjadi pihak yang memfasilitasi kredit modal kepada petani tebu. Kredit modal yang berasal dari pemerintah dan swasta akan disalurkan kepada petani tebu melalui KPTR Sari Madu dan PG Redjosarie. KPTR Sari Madu melakukan MoU dengan Dishutbun Kabupaten Magetan dan KUB Rosan Kencana. Peran PG Redjosarie sebagai avalis juga membuat BRI terus memberikan kepercayaan kepada petani tebu untuk memperoleh kredit modal. Berdasarkan hal tersebut, KPTR Sari Madu dan PG Redjosarie memiliki komitmen untuk menjadi pihak perantara penyaluran kredit modal dari pemerintah dan swasta kepada petani tebu.

3. Kerjasama koordinasi antara Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Magetan dan PG Redjosarie

Petugas penyuluh melakukan koordinasi dan pengawasan melalui verifikasi data luas lahan di CPCL dan RDKK dengan data luas lahan di lapangan. Petugas penyuluh melakukan kunjungan lahan ke areal sawah petani tebu. Perwakilan petugas penyuluh dari masing-masing komponen akan melakukan pengukuran lahan dengan GPS. Hasil pengukuran lahan dengan GPS akan disesuaikan dengan hasil luas lahan di CPCL dan RDKK.

- b. Faktor penghambat

1. Peran APTR kurang maksimal

APTR tidak menjalankan perannya secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak munculnya peran APTR dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat. APTR hanya sebatas paguyuban yang dibentuk oleh petani sebagai sebuah keharusan untuk mewadahi perkumpulan petani tebu. Peran APTR yang

kurang maksimal ini disebabkan kurangnya pengelolaan paguyuban oleh anggota APTR. Sebagaimana diketahui bahwa anggota APTR adalah petani tebu sehingga kurang memahami peran mereka untuk memperjuangkan harga gula. Anggota APTR hanya mengutamakan kepentingan untuk budidaya tebu.

2. Dinas Perkebunan Kabupaten Magetan tidak menyediakan tenaga penyuluh

Peran petugas penyuluh hanya sebatas kunjungan lahan dan sosialisasi program pemerintah, sementara PTR (sinder PG Redjosarie) yang lebih berperan dalam penyuluhan terhadap petani tebu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Perkebunan Kabupaten Magetan kurang memperhatikan nasib petani tebu yang membutuhkan bantuan informasi dan teknologi.

3. Pihak PG Redjosarie mempersulit persyaratan pengajuan KKP-E

Persyaratan yang harus dilengkapi petani tebu dalam pengajuan KKP-E lebih banyak dibandingkan persyaratan dalam pengajuan ketiga kredit modal lainnya yang hanya membutuhkan CPCL saja. Administrasi kelengkapan tersebut membuat pencairan KKP-E

menjadi lama dibandingkan ketiga kredit modal lainnya. Apabila petani tebu mengajukan kredit pada awal tahun, maka pencairan kredit harus menunggu selama 2 bulan. Sedangkan tiga kredit modal lainnya akan langsung dicairkan apabila dana sudah berada di KPTR Sari Madu.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* terkait dalam Pengembangan Tebu Rakyat pada wilayah kerja PG Redjosarie telah menjalankan peran dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran *stakeholder* dalam kegiatan (1) Pemberian kredit modal kepada petani tebu; (2) Kegiatan penyuluhan; (3) Kegiatan Forum Temu Kemitraan; dan (4) Kegiatan kebun peraga. Masing-masing *stakeholder* saling berkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap petani tebu dalam (a) pengajuan dan penyaluran kredit modal, (b) melakukan penyuluhan dalam budidaya tebu, (c) penyelesaian masalah yang dihadapi petani tebu dan PG Redjosarie melalui musyawarah, serta (d) berupaya untuk peningkatan produksi tebu melalui SBP yang dikembangkan pihak PG Redjosarie.

Daftar Pustaka

- Anonymous, (2010) **Pengembangan Perkebunan Tebu Menuju Swasembada Gula**. [Internet] Available from <<http://www.datacon.co.id/Agri-2010Gula.html>> (Accessed 23 Des 2013).
- Badan Pusat Statistik, (2011) **Statistik Tebu Indonesia 2011 (Indonesia Sugar Cane Statistics 2011)**. [Internet] Available from <<https://www.google.com/search?q=perkembangan+luas+areal+perkebunan+tebu+menurut+status+pengusahaan+tahun+2009-2011++menurut+bps>> (Accessed 10 Jan 2014).
- Denhardt, Janet Vinzant and Denhardt, Robert B. (2004) **The New Public Service: Serving, Not Steering**. New York, M.E. Sharpe.
- Domai, Tjajanulin. (2011) **Sound Governance**. Malang, UB Press.
- Hadi, Nur. (2011) **Corporate Social Responsibility (edisi pertama)**. Yogyakarta, Graha.
- Hetifah, S.J Sumarto. (2003) **Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia**. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Megapos, (2013) **Buka Giling PG Rejosarie Kecamatan Kawedanan, Kab. Magetan**. [Internet] Available from <<http://megapos.co/2013/05/19/buka-giling-pg-rejosarie-kecamatan-kawedanan-kab-magetan/>> (accessed 12 Nov 2013).
- Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim; Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2013**. Jakarta, Kementrian Pertanian.
- Pratikno. (2004) **Dari Good Governance Menuju Just & Democratic Governance**. Makalah untuk Seminar Nasional, FISIPOL UGM.
- Riyadi, Soeprapto. (2006) **Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Publik**. Malang, Riyadi Press.
- Robbins, S.P. (2001) **Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications**. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
- Soekanto, Soerjono. (1990) **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta, Rajawali Pers.
- Stoker, Gerry. (2004) **New Localism, Participation and Networked Community Governance**. [Internet] Available from <[melalui http://www.ipeg.org.uk/docs/ngcnewloc.pdf](http://www.ipeg.org.uk/docs/ngcnewloc.pdf)> (Accessed 9 Jan 2014).

- Syafiie, Inu Kencana. (2006) **Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. (2003) **Birokrasi dan Politik di Indonesia**. Jakarta, Rajawali Pers.
- Utomo, Warsito. (2006) **Adminstrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dan Administrasi Negara ke Administrasi Publik**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.